

ABSTRAK

Konflik di Republik Afrika Tengah berlangsung sejak Desember 2012 terjadi antara Pemerintah Republik Afrika Tengah dan Seleka, sebuah koalisi kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak Seleka menganggap Presiden Bozize melanggar janjinya. Sebelumnya Bozize sepakat memasukan anggota mereka ke dalam militer negara Afrika Tengah. Inisiatif PBB dalam mengatasi kelompok pemberontak Seleka karena banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Afrika Tengah. Selain itu juga Pemerintah Afrika Tengah meminta secara bantuan secara khusus kepada PBB untuk dapat mengatasi kelompok pemberontak yang semakin merajalela menduduki kota tersebut.

Mekanisme penyelesaian konflik antara pemerintah Afrika Tengah dan kelompok pemberontak Seleka dengan cara antara lain: PBB melakukan *peace keeping* dengan misi pengiriman pasukan operasi perdamaian yang disebut MINURCAT dan MICOPAX untuk membantu menjaga perdamaian dan keamanan di kota itu, PBB melalui Dewan Keamanan mengadakan *peace making* menyerukan agar semua pihak mengadakan dialog antara pemerintah Afrika Tengah dan kelompok pemberontak Seleka dengan pengawasan ECCAS sehingga mencapai kesepakatan damai antara kedua pihak serta PBB melalui Dewan Keamanan pada 25 Mei 2010 mengeluarkan resolusi S/RES/1923 (2010). Resolusi itu membahas komitmennya terhadap kedaulatan, persatuan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik Republik Afrika Tengah serta mengutuk serangan militer oleh kelompok bersenjata dan upaya untuk mengacaukan proses pembangunan perdamaian di Republik Afrika Tengah.